

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kesejahteraan Masyarakat

1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera adalah dari kata aman, tenteram, sejahtera, dan sejahtera yang pada gilirannya berarti sejahtera. Pangan, sandang, perumahan, air bersih, dan kesempatan untuk terus belajar dan mencari pekerjaan merupakan kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui kesejahteraan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidupnya sehingga ia tidak perlu khawatir akan uang, kebodohan, ketakutan, atau kemiskinan. Untuk memastikan pikiran dan tubuhnya aman dan tenteram.⁹ Teori Negara Kesejahteraan mengatakan bahwa negara kesejahteraan adalah suatu jenis skema perlindungan sosial di mana pemerintah menghabiskan lebih banyak uangnya untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyatnya terpenuhi.¹⁰ Kesejahteraan masyarakat akan mempunyai banyak kebutuhan. Untuk menjaga keseimbangan, kebutuhan manusia adalah hal-hal yang dibutuhkan setiap orang untuk mempertahankan diri.

⁹Ahmad Asnawi, 'Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu' (skripsi, Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), h. 45

¹⁰Agus Suryono 'Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat', *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6.2(2014) 98-102 (h. 99)

Teori kesejahteraan mengatakan bahwa seseorang berada pada keadaan dimana ia dapat mencapai sesuatu, mempunyai tujuan hidup yang jelas, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, menjadi mandiri, mempunyai kendali atas potensi psikologisnya, serta mampu mengembangkan kelebihanannya dan menerima kelemahannya. Kondisi yang telah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan dunia usaha sudah baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan sehat di semua tingkatan, termasuk pikiran, tubuh, dan hubungan sosial. Bukan sekedar penghapusan beberapa permasalahan sosial. BPS memeriksa kesejahteraan masyarakat dengan melihat hal-hal seperti jumlah penduduk, kesehatan dan gizi, pendidikan, pekerjaan, tingkat dan tren pengeluaran, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya. Orang-orang di suatu tempat dianggap miskin jika mereka tidak dapat memperoleh cukup uang untuk hidup. Seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya jauh di bawah pendapatan rata-rata. Hal ini karena kurangnya uang membuat lebih sulit untuk mendapatkan

hal-hal seperti makanan, perumahan, sekolah, dan perawatan kesehatan. Masyarakat juga dianggap miskin jika tidak mempunyai kesempatan untuk maju dalam hidup karena pendapatannya jauh lebih rendah dari rata-rata.

Ketika sumber daya ekonomi tidak mencukupi, individu atau kelompok tersebut tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, berinvestasi dalam pengembangan diri, atau meraih peluang ekonomi yang lebih baik. Akibatnya, kemiskinan menjadi penghalang bagi kesejahteraan secara menyeluruh, termasuk peluang mobilitas sosial dan ekonomi.¹¹

Kekurangan uang merupakan permasalahan yang biasa terjadi dalam menjalankan sebuah desa. Jadi desa belum mampu melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, yaitu menyediakan layanan, memberikan kekuatan kepada masyarakat, dan membantu kota berkembang.¹²

¹¹ Romi Adetio Setiawan, "Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis," *Religions* 14, no. 11 (2023).

¹² Andi Pitono, Kartiwi, 'Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang' *J-3P: Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 6.1 (2021), 33-56 (h. 36).

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Agar suatu daerah dianggap maju, harus ada tanda-tanda yang menunjukkan seberapa baik kinerja masyarakatnya dan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan. Data kesejahteraan masyarakat dapat ditemukan dengan mengukur data dari berbagai bidang pertumbuhan. Indikator kebahagiaan masyarakat antara lain indikator pekerjaan, indikator kependudukan, dan indikator sosial lainnya.

Indikator pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran luas mengenai kondisi kehidupan masyarakat. Masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera jika masyarakatnya menghasilkan lebih banyak uang. Karena merosotnya standar hidup akibat naiknya harga kebutuhan pokok, masyarakat mengubah cara mereka membeli barang. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ada empat cara mengukur besaran bantuan, yaitu:

- a. pendapatan.
- b. Pengeluaran keluarga atau biaya penggunaan.
- c. Keadaan rumah, kondisi kehidupan, dan kesehatan anggota keluarga.

- d. Betapa mudahnya mendapatkan pelayanan kesehatan.¹³

Adapun indikator kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, antara lain:

- a. Adanya peningkatan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial segenap lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Adanya peningkatan melalui penetapan sistem kelembagaan ekonomi sosial politik yang menjunjung hargadiri
- c. Adanya penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai aspirasi kemampuan dan standar kemanusiaan.

B. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

1. Definisi Kesejahteraan Islam

Setiap aspek kehidupan, betapapun kecil atau menantanginya, diatur oleh hukum Islam. Di semua bidang masyarakat, termasuk pemerintahan, bisnis,

¹³ Revi Safitri, 'Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam' (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), h. 52.

akademisi, seni, dan budaya. Tentunya sistem perekonomian suatu bangsa akan berjalan lebih lancar dan efektif jika berakar pada ajaran Islam dan Sunnah. Akar kata sejahtera, sejahtera, berarti tenteram, aman, sejahtera, dan tenteram. Jika dibandingkan dengan sistem lain, model komersial Islam menonjol. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi Islam dapat ditelusuri kembali ke syariah, kode hukum universal dan kode etik bagi umat Islam. Tujuannya sendiri, selain memperhatikan kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan dan kebahagiaan materi.

Yang kami maksud dengan “Islam” adalah menyerahkan segala kendali dan berserah diri kepada Allah SWT. Fakta bahwa umat Islam dapat dipercaya merupakan aset utama bagi keimanan. Selain itu, seluruh umat Islam di mana pun terikat oleh ajaran Islam, yang menyerukan kepada semua orang untuk menyebarkan kegembiraan, kedamaian, dan rahmat. Karena kemegahannya, komunitas Islam pertama didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ekonomi Islam menjabarkan tujuan-tujuannya dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, sehingga segala sesuatunya disusun dan dihubungkan dengan cara ini. Uraian berikut dapat digunakan untuk menentukan tingkat kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kekayaan fisik dan mental seseorang.

Kunci hidup bahagia adalah memiliki keyakinan pada diri sendiri.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Melalui penerapan syariah, pemerintah harus mampu melindungi kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan ruang pertumbuhan yang baik dan berkeadilan. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan jangka panjang dan pembagian kekayaan yang adil yang dilakukan demi kebaikan semua orang. Agar suatu masyarakat berada pada kondisi terbaiknya secara materi, kejayaan ini tidak akan bertahan lama jika kesadaran sosial dan politik masyarakat dan kelompok rendah, perpecahan keluarga, dan adanya ketegangan sosial. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.¹⁴

Oleh karena itu, memanfaatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya dengan cara yang memungkinkan setiap individu memanfaatkan sumber dayanya sebaik-baiknya adalah salah satu cara terbaik untuk membantu manusia mencapai tujuan kesejahteraan jasmani dan rohani bakat, imajinasi, dan orisinalitas.

¹⁴ Suci Wulan Dari, 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam' (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 74.

Selama tingkat pengangguran tinggi, hal ini tidak mungkin dilakukan.

C. Pengelolaan Dana Desa

Sebuah desa terdiri dari komunitas-komunitas yang memiliki ikatan erat yang anggotanya telah membentuk norma-norma sosial melalui kontak berulang-ulang satu sama lain. Anggaran tahunan yang disebut “dana desa” disalurkan oleh APBN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Mengingat kedudukan hak asasi manusia dan posisinya dalam skala prioritas desa, maka desa dapat memanfaatkan pendapatannya untuk menunjang hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. menyelesaikan. Peraturan Menteri daerah diajak berkonsultasi pada saat pengambilan keputusan mengenai pengeluaran keuangan daerah.¹⁵ Sebagai unit komunitas yang diakui secara resmi, desa memiliki batas wilayahnya sendiri dan wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri, kepentingan lokal yang timbul dari permasalahan masyarakat, dan hak adat.

Untuk membiayai pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan desa digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi sumber daya moneter merupakan langkah penting

¹⁵ Sayekti Suindyah Dwiningwarni, Ahmad Zuhdi Amrulloh, ‘Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur’, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4.1 (2020) 1-20 (h. 3).

dalam mendorong pengembangan masyarakat.¹⁶ Meningkatkan sistem pemantauan dan mengurangi pelanggaran hingga maksimal adalah tujuan utama investasi kota.¹⁷ Memberi pemerintah kota dukungan keuangan melalui pendanaan desa sehingga mereka dapat meningkatkan infrastruktur fisik dan non-fisiknya dan berkembang.¹⁸ Oleh karena itu, agar suatu desa bisa mandiri maka seluruh warga desa perlu bekerja sama untuk memajukan desanya. Kesejahteraan setiap orang, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan, dipengaruhi oleh kemampuan organisasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kendali atas pendapatan daerah.

Untuk mencapai semuanya, penting bagi pejabat daerah yang bertanggung jawab atas dana tersebut untuk bersikap transparan mengenai peraturan yang mengaturnya. Akibat perbincangan kami, pemerintah desa kesulitan menangani anggaran daerah. Cara lain pemerintah menunjukkan dukungannya terhadap desa yang otonom, kuat, progresif, dan berkeadilan adalah melalui pengelolaan dana desa.

¹⁶ Aminah, Novita Sari, 'Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat', *JPP: Jurnal Public Policy*, 4.1 (2019), 22-32 (h. 23).

¹⁷ Kasih Elnis Gulo , Sophia Molinda Kakisina, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', *JAMANE: Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2.1 (2023), 39-43 (h. 40).

¹⁸ Diah Dwi Nawang Wulan, Herlina Helmy, 'analisis penerapan pengelolaan dana desa' *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5.1 (2023), 160-175 (h. 162).

Proyek-proyek termasuk operasi pemerintah, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial semuanya mendapat pendanaan dari anggaran ini. Seperti mempersiapkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelesaian tugas guna mencapai tujuan.¹⁹ Proses mengatur, memimpin, dan mengarahkan sarana keuangan, fisik, dan informasi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan cara yang seefisien dan seefektif mungkin.²⁰

Dalam mengelola dana kota, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, seperti:

1. Perencanaan

Perencanaan serangkaian pilihan yang membantu Anda melakukan sesuatu yang berguna dengan alat yang sudah Anda miliki..

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah Kegiatan program mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau mencapai rencana program yang diusulkan. Pelaksanaan APBDes berhubungan langsung dengan aliran pendapatan desa. Pelaksanaan anggaran di desa melibatkan transaksi-transaksi tertentu yang berkaitan

¹⁹ Soni Rahmadi, 'Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasa' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2020) h. 16.

²⁰ Tery Dinayandra, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2017) h. 29.

dengan pendapatan dan belanja daerah. Rekening desa berfungsi sebagai sarana untuk memproses seluruh pemasukan dan pengeluaran desa sesuai dengan kewenangannya.

3. Pengawasan

Manajemen operasional adalah evaluasi sistematis atas pencapaian, pengukuran, dan penyesuaian upaya implementasi. Hal ini melibatkan pengambilan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa operasi implementasi berjalan sesuai rencana.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah Pelaporan keuangan adalah metodologi penyajian informasi keuangan dan menunjukkan kinerja yang dicapai, Mereka berfungsi sebagai landasan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Sebagai teknik pemenuhan komitmen, pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Untuk menghindari kesalahan dalam keuangan desa dan mencapai tujuan yang ditetapkan, pengelola menggunakan empat langkah proses: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

Undang-Undang Keenam Tahun 2014 Otonomi masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan tujuan dana desa yang dimaksudkan untuk mendukung

inisiatif pemerintah di bidang tersebut, adapun tujuannya sebagai berikut:

- 1) mengurangi kemiskinan.
- 2) Mendorong perluasan perekonomian di daerah.
- 3) Menutup kesenjangan pertumbuhan regional.
- 4) Membawa lebih banyak orang dari masyarakat ke dalam proses pembangunan.²¹

Pemberian dana desa diharapkan dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi pembangunan yang berkeadilan, memungkinkan penggunaan dan penikmatan pembangunan oleh masyarakat. Hal ini merupakan wujud nyata kebijakan pemerintah pada masyarakat yang berada di daerah tertinggal. Berbagai prinsip mengatur pengelolaan pendapatan desa, yakni:

1. **الأعدل Al-Adl (keadilan)**

a. **Definisi Al-Adl**

Istilah Arab untuk "adil" adalah *Al-adl*. Berasal dari kata Arab yang berarti "keadaan lurus", *al-'adl* mencakup berbagai sifat yang diinginkan, termasuk keterusterangan, keadilan, kesetaraan, keseimbangan, dan kesesuaian. Dalam interaksi sosial, keadilan sangatlah penting karena keadilan menjamin setiap orang diperlakukan secara adil dan seimbang. Terlepas

²¹ Amal Fazri Nur Ridwan, Riskayanto, 'Prinsip Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah', *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3, (2023), 3341-3349 (h. 3342).

dari sifat mereka yang tidak adil, setiap orang menyadari perlunya keadilan sebagai kualitas terpuji yang dihargai baik oleh teman maupun lawan.²² Oleh karena itu, Islam menganut cita-cita penerapan keadilan dalam urusan kemasyarakatan. Penegakan keadilan akan bermuara pada terbentuknya struktur sosial yang harmonis.

Keadilan dalam prinsip-prinsip Islam mencakup kebebasan bersyarat yang, jika dilihat sebagai kebebasan yang tidak dibatasi, akan melemahkan struktur sosial dan menghambat pemberdayaan manusia yang efektif.²³ Dalam kerangka Islam, gagasan keadilan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial, secara inheren terkait dengan perdebatan mengenai gagasan ketuhanan, alam, kehidupan, dan kemanusiaan. Dalam Islam, keadilan memainkan peran penting dalam memberikan individu rasa aman, keselamatan, dan kebahagiaan secara keseluruhan dalam hidup mereka. Keadilan dalam Islam terkait erat dengan paradigma etika dalam memperoleh dan mengalokasikan properti.²⁴ Fenomena ini mungkin saja terjadi karena efek bawah sadar dari sikap seseorang.

²² Rudi Irawan, 'Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an', *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, 2.2 (2018), 232-247 (h. 237).

²³ Adib Susilo, 'Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam', *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2016) 193-209 (h. 201).

²⁴ Hafidz Taqiyuddin, 'Konsep Islam Tentang Keadilan', *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 10.2 (2019) 167-181 (h.173-178).

b. Indikator العدل *Al-Adl* (Keadilan)

Indikator *Al-Adl* atau keadilan terdapat alokasi keuangan desa yang wajar untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Air Putih. Penerapan rencana pembangunan jangka menengah Desa menjadi standar penentu keadilan pembangunan infrastruktur di desa.

Beberapa indikator keadilan masyarakat desa, antara lain:

1. Pembangunan merata, Pembangunan desa harus dilakukan secara merata tanpa diskriminasi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
2. Rancangan pembangunan disusun sebagai tanggapan atas masukan masyarakat yang dikumpulkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
3. Partisipasi masyarakat Masyarakat desa, harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
4. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, Keadilan sosial dapat diwujudkan dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

5. Menghormati hak asasi manusia, Keadilan dapat diwujudkan dengan menghormati hak asasi manusia.

2. Transparansi

a. Definisi Transparansi

Kalau sesuatu itu asli, jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kita katakan itu transparan. Berbagi informasi tentang pengelolaan sumber daya publik dengan pemangku kepentingan dengan cara ini menunjukkan keterbukaan organisasi.²⁵ Perspektif ini menjelaskan bahwa transparansi mencakup lebih dari sekedar penyediaan informasi mengenai pengelolaan pemerintahan. Untuk itu diperlukan penyediaan sarana yang mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi tersebut.

Nilai mendasar dari tata kelola pemerintahan adalah transparansi, yang memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses tanpa batas terhadap informasi tentang bagaimana pemerintahan mereka dijalankan. Perincian kebijakan, termasuk bagaimana kebijakan tersebut dikembangkan dan dilaksanakan, serta hasil yang diharapkan, semuanya merupakan

²⁵ Eva Julita, Syukriy Abdullah, 'Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa', *JIAMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5.2 (2020) 213-221 (h. 216).

bagian dari hal ini.²⁶ Tata kelola yang efektif harus memiliki transparansi, partisipasi, dan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat untuk mengetahui prosedur administrasi pemerintahan. Transparansi dan penyebaran informasi yang dilakukan pejabat pemerintah berdampak pada pencapaian banyak lainnya.²⁷ Semua warga negara memiliki akses tidak terbatas terhadap semua catatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk rincian kebijakan.

Untuk mencapai tujuan ini, kami mempertimbangkan hak masyarakat atas akses tanpa batas terhadap informasi yang akurat dan terbuka mengenai tugas lembaga pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya yang diamanatkan.²⁸ Transparansi mengacu pada praktik resmi dalam menyajikan laporan secara publik kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai berfungsinya suatu manajemen, termasuk seluruh aspek sebagai

²⁶Umi Purwanti, 'Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim', *JIASK: Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, 3.2 (2021), 79-89 (h. 80).

²⁷Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka', *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8.1(2020), 19-27 (h. 22).

²⁸Wiwik kusumaning Asmoro, Novie Astuti Setianingsih, 'Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana "Prodamas" dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan', *OWNER: Jurnal Akuntansi*, 3.2 (2019), 270-277 (h. 271-272).

landasan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.²⁹ Transparansi merupakan fungsi penting dan sangat diperlukan yang harus dilaksanakan dalam suatu organisasi atau lembaga publik. Hal ini berfungsi sebagai sarana untuk mengawasi kegiatan yang telah dilakukan, sehingga memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak ambigu dan mudah dimengerti.

b. Indikator Transparansi

1. Kesiediaan Dan Aksesibilitas Dokumen

Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa adalah metode untuk memberikan transparansi guna mencegah kegiatan penipuan atau penyalahgunaan dana daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas program melalui penyediaan dokumentasi atau laporan yang merinci alokasi dana untuk program atau kegiatan yang telah diselesaikan dan disepakati bersama.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Masyarakat perlu mengetahui apa yang terjadi, bagaimana mereka dapat membantu, dan informasi

²⁹ Niken Kusumasari, Chaidir Iswanaji, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Pada Baznas Ri Di Masa Pandemi Covid-19', *Bilancia: Jurnal Ilmiah*, 5.4 (2021) 417-428 (h. 421)

apa mengenai masyarakat yang dapat dipercaya, waktu, dan lokasi pelaksanaan program, serta perkiraan durasi penyelesaiannya. Selanjutnya masyarakat mengemban fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa untuk mendapatkan wawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.

3. Keterbukaan proses

Sesuai dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah wajib memberikan informasi yang akurat, tepat, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Memastikan keterbukaan informasi manajemen yang transparan dan jujur merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan komprehensif mengenai penyelenggaraan ADD. Keterbukaan atau transparansi mengacu pada kecenderungan pemerintah desa untuk memberikan informasi yang akurat tentang berbagai aspek prosedur penyelenggaraan pemerintahan.

4. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa kementerian dan lembaga telah menerapkan berbagai strategi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pada

program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah penerapan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh publik. Misalnya, dengan menggunakan teknologi informasi, kementerian dapat menyediakan platform online yang memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan dan realisasi anggaran secara real-time.

5. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

Untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses ini. Peran masyarakat dalam perencanaan anggaran publik mencakup partisipasi, pengawasan, dan pemantauan terhadap kebijakan dan program yang didanai oleh anggaran publik.

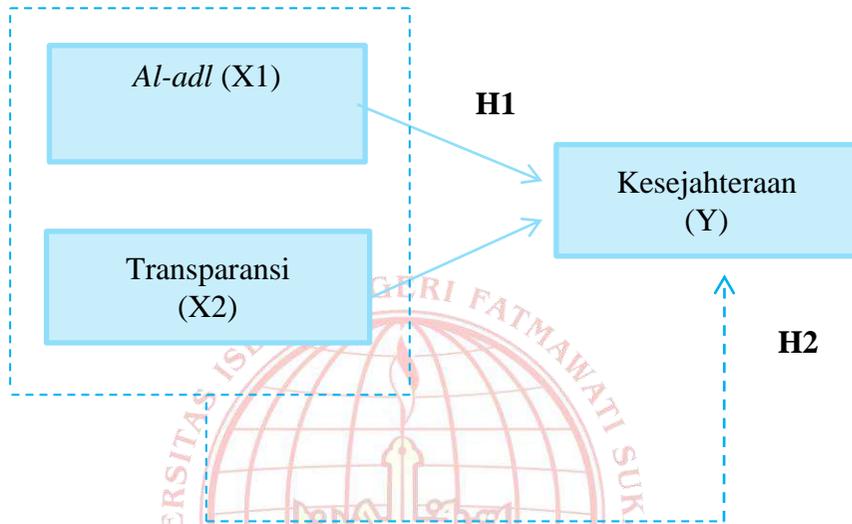
Transparansi pemerintah dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengawasi aktivitas orang-orang dan pihak-pihak di luar organisasi pemerintah desa dalam berbagi informasi secara publik tentang pengelolaan ADD dan fakta-fakta relevan lainnya kepada masyarakat.³⁰ Penyebaran informasi ini dapat dilakukan melalui forum komunitas dan juga melalui papan informasi atau publikasi lain yang mudah diakses yang dikeluarkan oleh dewan.

³⁰ Sri Mulyaningsih, 'Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkalan' (Skripsi, Universitas Lampung, 2019), h. 9

D. Kerangka Berpikir

Faktor yang mendorong kesejahteraan masyarakat dilatar belakangi oleh prinsip keadilan dan transparansi. Transparansi sendiri meliputi, adanya aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa, adanya kejelasan dan kelengkapan informasi untuk mengetahui waktu dan lokasi pelaksanaan program oleh pemerintah desa, adanya keterbukaan informasi publik dan tidak menyesatkan masyarakat, adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, adanya keterbukaan proses. Apabila sesuatu jelas dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan maka dapat dikatakan transparan. Berbagai informasi tentang pengelolaan sumberdaya publik dengan pemangku kepentingan dengan cara ini keterbukaan organisasi.

Al-Adl sendiri mencakup berbagai sifat yang diinginkan termasuk keterusterangan, keadilan, kesetaraan, keseimbangan dan kesesuaian. Dalam hal ini keadilan sangat penting karena menjamin setiap orang diperlakukan secara adil.



Tabel 2.1
Kerangka Penelitian

Keterangan ————— = Uji Parsial
 - - - - - = Uji Simultan

E. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yang akan diuji ialah:

Ha1 : Prinsip *Al-Adl* berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Air Putih

Ho1 : Prinsip *Al-Adl* tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Air Putih

Ha2 : prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Air Putih

Ho2 : prinsip transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Air Putih

